



# **RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA**

**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan satu tahun 2023.

Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran di atas perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung visi, misi tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Penyusunan perubahan rencana kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 serta penyerapan anggaran pada rencana kerja sampai dengan triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;

3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2023;

Penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 dimulai dari pengumpulan data dan analisis permasalahan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan rencana kerja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
  28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);

29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe C Kabupaten Bangka ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 53 );
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Perhubungan Kabupaten Bangka ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 12 );

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2023 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

- 2.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023.

### BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Output Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja

### BAB IV. PENUTUP

### LAMPIRAN



**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT**  
**DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Dari 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2023 maka persentase kegiatan yang telah dilaksanakan belum mencapai target yang diharapkan, berdasarkan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) per Mei 2023, serapan keuangan Dinas Perhubungan baru mencapai 41,68% dari total anggaran sebesar Rp. 27.765.164.060; (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta serratus enam puluh empat ribu enam puluh rupiah) dan capaian fisik mencapai 43%,
2. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan kegiatan fisik sampai dengan Juni 2023 baru dalam proses pengadaan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka sampai dengan Juni 2023 sebagai berikut :

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD  
Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka  
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
															I			II												
1	2	3						4	5	6		7		8		9			10			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
		2	1	5				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN			43.502.670.422		33.206.715.706		27.769.164.060			1.581.431.971			11.573.118.855			13.154.550.826		46.293.638.912		106,42		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	2	1	0	5			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	26,00	21.134.480.422	25,46	9.431.704.802	25,00	7.484.151.560	0,00		1.038.094.643	0,00		2.965.256.720	0,00		4.003.351.363	0,00	13.367.428.545	0,00	63,25		
									Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	13,50		10,15	-	12,50		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			

									Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100							
									Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	64,76		63,50		64,76		0,00		0,00		0,00							
									Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	0,98		0,90		0,98		0,00		0,00		0,00							
									Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	80,00		75,00		80,00		0,00		0,00		0,00							
		2	15	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	100	285.583.410,00	100	46.180.605,00	100	111.724.800,00	33,33	30.690.000,00	0,00	54.440.000,00	33,33	85.130.000,00	100	131.310.605,00	100	45,98		
									Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	100		100	-	100		50,00		0,00		50,00		100		100			
		2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	15	88.794.060,00	10	46.180.605	6	23.850.000	33,33	2	7.490.000	0,00	11.690.000	33,33	2	19.180.000	12	65.360.605	80,00	73,61

		2	1	0	2	0	0	2	0	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	15.000.000			2	15.000.000	0,00	0	105.000	0,00	4.015.000	0,00	0	4.120.000	0	4.120.000	0,00	27,47	
		2	1	0	2	0	0	3	1	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	10.000.000			2	10.000.000	0,00	0	-	0,00	3.920.000	0,00	0	3.920.000	0	3.920.000	0,00	39,20	
		2	1	0	2	0	0	4	1	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	10.000.000			2	10.000.000	100,00	2	7.350.000	0,00	8.990.000	100,00	2	16.340.000	2	16.340.000	100,00	163,40	
		2	1	0	2	0	0	5	1	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	10.000.000			2	10.000.000	0,00	0	1.640.000	0,00	5.560.000	0,00	0	7.200.000	0	7.200.000	0,00	72,00	
		2	1	0	2	0	0	6	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja yang disusun (dokumen)	9	135.064.550,00	6	-	4	26.150.000	50,00	2	9.905.000	0,00	16.065.000	50,00	2	25.970.000	8	25.970.000	88,89	19,23	
		2	1	0	2	0	0	7	1	7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi	8	16.724.800,00			8	16.724.800	37,50	3	4.200.000	0,00	4.200.000	37,50	3	8.400.000	3	8.400.000	37,50	50,22	



[illegible]

									Perangkat Daerah (%)																				
		2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)	3	319.379.600	1	600.000	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0	-	1	600.000	33,33	0,19				
									Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	3		1	-	0,00		0,00	0,00		0,00	0	-	1	-	33,33					
		2	15	01	2	06	09	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan jasa penyediaan makanan dan minuman yang tertangani (bulan)	36	662.098.138	24	287.618.593	12	210.392.290	25,00	3	85.852.500	0,00		131.306.168	25,00	3	217.158.668	27	504.777.261	75,00	76,24	
									Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	36		24	-	12		25,00	3		0,00			25,00	3	-	27	-	75,00		
		2	15	01	2	06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	10.000.000			12	-	25,00	3		0,00			25,00	3	-	3	-	25,00	0,00	
		2	15	01	2	06	11	Sub KegiatanDukung an Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	20.000.000			12	20.000.000	25,00	3		0,00	-		25,00	3	-	3	-	25,00	0,00	

		2	1	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	80, 00	2.086.875.0 30	75, 00	69.095.1 00	80, 00	1.465.12 0.225	0,0 0		-	0, 00		131.628. 624	0,0 0		131.628. 624	70, 00	200.723. 724	70, 00	9,6 2	
		2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1.281.400.0 00			1	1.281.40 0.000	0,0 0	0, 00	-	0, 00		15.371.0 64	0,0 0	0	15.371.0 64	0	15.371.0 64	0,0 0	1,2 0	
		2	1	0	2	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan (paket)	3	234.641.46 1,60	1	36.901.6 00	1	49.935.2 25	0,0 0	0, 00	-	0, 00		-	0,0 0	0	1	36.901.6 00	33, 33	15, 73		
		2	1	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)	3	570.833.56 8,60	1	32.193.5 00	1	133.785. 000	0,0 0	0, 00	-	0, 00		116.257. 560	0,0 0	0	116.257. 560	1	148.451. 060	33, 33	26, 01	
		2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100	2.800.208.8 85,60	100	1.737.42 9.128	10 0	1.128.59 8.045	25, 00		257.133. 563	0, 00		548.380. 677	25, 00		805.514. 240	100	2.542.94 3.368	100	90, 81	
									Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (layanan)	9		3	-	3		3			0, 00			3,0 0		3		33, 33			
		2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	1.808.171.3 00,00	24	1.271.36 6.303	12	931.971. 000	25, 00	3	215.254. 302	0, 00		478.171. 818	25, 00	3	693.426. 120	27	1.964.79 2.423	75, 00	108 ,66	



		2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	354.670.98 5,60	24	137.037. 485	12	96.432.9 55	25, 00	3	19.019.7 83	0, 00	29.909.7 74	25, 00	3	48.929.5 57	27	185.967. 042	75, 00	52, 43	
		2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara (bulan)	36	66.200.000, 00	24	17.970.0 00	0	-	0,0 0	0		0, 00		0,0 0	0	-	24	17.970.0 00	66, 67	27, 15	
		2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	571.166.60 0,00	24	311.055. 340	12	100.194. 090	25, 00	3	22.859.4 78	0, 00	40.299.0 85	25, 00	3	63.158.5 63	27	374.213. 903	75, 00	65, 52	
		2	1	0	2	0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik (%)</b>	95	1.639.484.6 60,00	80, 00	833.353. 111	95, 00	357.585. 000	25, 00		15.873.3 22	0, 00	30.903.3 00	25, 00		46.776.6 22	80, 00	880.129. 733	84, 21	53, 68	
		2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara (unit)	9	1.131.784.6 60,00	6	587.858. 348	3	142.585. 000	33, 33	1	15.873.3 22	0, 00	29.403.3 00	33, 33	1	45.276.6 22	7	633.134. 970	77, 78	55, 94	
		2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	45	15.000.000			30	15.000.0 00	16, 67	5		0, 00	1.500.00 0	16, 67	5	1.500.00 0	5	1.500.00 0	11, 11	10, 00	

		2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang direhabilitasi (unit)	3	492.700.00 0,00	2	245.494. 763	1	200.000. 000	0,0 0	0, 00		0, 00	-	0,0 0	0	-	2	245.494. 763	66, 67	49, 83	
									Jumlah bangunan lainnya (terminal) yang direhabilitasi (unit)	1		0	-	0,0 0		0,0 0	0, 00		0, 00		0,0 0	0	-	0,0 0	-	0,0 0		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																22, 99		13,87	0, 00	39,62	22, 99		53,49			44, 47	63, 25	
Predikat Kinerja																SR		SR	S R	SR	SR		R			SR	R	
2	Meningk atnya Kualitas , Kuantita s Pelayan an dan Kesela matan Transpo rtasi	2	1	0				PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Rute angkutan transportasi ke sentra ekonomi	7,5 0	22.368.190. 000	5,0 0	23.775.0 10.904	7,5 0	20.285.0 12.500	0,0 0		543.337. 328	0, 00	8.607.86 2.135	0,0 0		9.151.19 9.463	5,0 0	32.926.2 10.367	66, 67	147 ,20	
	Meningk atnya Kepuas an Pelayan an Sektor Perhubu ngan Darat								Persentase Kecamatan yang mendapatkan pelayanan angkutan bus sekolah	75, 00		50, 00	-	75, 00			0,0 0		0, 00		0,0 0			50, 00		66, 67		
									Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Layak Jalan	100		90, 00	-	10 0			0,0 0		0, 00		0,0 0			90, 00		90, 00		
									Presentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ	90, 00		85, 00	-	90, 00			0,0 0		0, 00		0,0 0			85, 00		94, 44		



								Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a yang Tersedia	200				1		0,0 0	0, 00		0, 00		0,0 0	0	-	0	-	0,0 0		
		2	1 5	0 2	2	0 2	0 3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah PJU lama yang terpelihara/diga nti (paket)	3	10.896.000. 000	2	8.081.44 1.824	0	5.384.27 5.000	0,0 0	0	206.784. 934	0, 00	2.912.62 8.079	0,0 0	0	3.119.41 3.013	2	11.200.8 54.837	66, 67	102 ,80
								Pembayaran token lampu jalan (bulan)	36		25	-	0		0,0 0	0		0, 00		0,0 0	0	-	25	-	69, 44		
								Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1				1		0,0 0	0, 00		0, 00		0,0 0	0	-	0	-	0,0 0		
		2	1 5	0 2	2	0 2	0 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah halte yang terpelihara (paket)	3	893.700.00 0	2	437.453. 250	0	75.000.0 00	0,0 0	0, 00		0, 00	6.000.00 0	0,0 0	0	6.000.00 0	2	443.453. 250	66, 67	49, 62
								Jumlah traffic light yang terpelihara (paket)	3		2	-	0		0,0 0	0, 00		0, 00		0,0 0	0	-	2	-	66, 67		
								Jumlah warning light yang terpelihara (paket)	3		2	-	0		0,0 0	0, 00		0, 00		0,0 0	0	-	2	-	66, 67		
								Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1				1		0,0 0	0, 00		0, 00		0,0 0	0	-	0	-	0,0 0		
		2	1 5	0 2	2	0 3		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Jumlah Terminal yang tersedia</b>	<b>2</b>	<b>200.000.00 0</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>200.000. 000</b>			<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0,0 0</b>		<b>-</b>	<b>0,0 0</b>	<b>-</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,0 0</b>
								Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang	2	200.000.00 0			2	200.000. 000	0,0 0	0, 00		0, 00	-	0,0 0	0	-	0	-	0,0 0	0,0 0



		2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara (paket)	3	294.590.000	2	82.498.000	0,00	-	0,00	0,00		0,00		0,00	0	-	2	82.498.000	66,67	28,00	
		2	1	0	2	0	6	Kegiatan Pelaksanaan Manejemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan yang dilakukan	100	300.000.000	100	100.487.053	100	100.000.000	27,27		13.730.000	0,00	21.800.620	27,27		35.530.620	100,00	136.017.673	100,00	45,34	
		2	1	0	2	0	6	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	300.000.000,00	1	100.487.053	11	100.000.000	27,27	3	13.730.000	0,00	21.800.620	27,27	3	35.530.620	4	136.017.673	33,33	45,34	
		2	1	0	2	0	7	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang disusun	3	60.000.000	0,00	-	1	25.000.000	0,00		820.000	0,00	2.440.000	0,00		3.260.000	0,00	3.260.000	0,00	5,43	
		2	1	0	2	0	7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	11	30.000.000			11	-	27,27	3		0,00		27,27	3	-	3	-	27,27	0,00	
		2	1	0	2	0	7	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	11	30.000.000			11	25.000.000	27,27	3	820.000	0,00	2.440.000	27,27	3	3.260.000	3	3.260.000	27,27	10,87	

		2	1	0	2	0		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase audit dan insepksi keselamatan LLAJ di Jalan	41,00	742.050.000,00	30,00	197.644.620	41,00	100.000.000	0,00		15.370.000	0,00		33.780.000	0,00		49.150.000	30,00	246.794.620	73,17	33,26	
		2	1	0	2	0	0	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah auditor dan inspektur yang tersedia (orang)	5	229.000.000,00	1	-	0,00	-	0,00	0,00			0,00	0		-	1	-		20,00	0,00	
		2	1	0	2	0	0	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara n Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggara an kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten (bulan)	36	513.050.000,00	24	197.644.620	11	100.000.000	27,27	3	15.370.000	0,00		33.780.000	27,27	3	49.150.000	27	246.794.620	75,00	48,10	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																6,06		2,68	0,00		42,43	6,06		45,11			71,30	147,20	
Predikat Kinerja																SR		SR	S R		SR	SR		SR			S	ST	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN															27.769.164.060			1.581.431.971			11.573.18.855			13.154.50.826		46.293.638.912			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinas Perhubungan (%)																14,53		5,69	0,00		41,68	14,53		47,37			57,89	105,23	
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinas Perhubungan																SR		SR	S R		SR	SR		SR			R	ST	

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang diluar perkiraan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program /kegiatan Dinas Perhubungan dilihat dari 2 (dua) faktor tersebut adalah:

A. Faktor Internal

- a) Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b) Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan perhubungan.

B. Faktor Eksternal

- a. Adanya perubahan harga barang dipasaran;
- b. Adanya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berubah;
- c. Sumberdaya manusia yang masih kurang kompetitif.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam pencapaian kinerja maka :

1. Koordinasi perlu dilakukan antar Dinas (Pemda) dan Masyarakat, sehingga ada persepsi yang sama agar pembangunan bidang perhubungan dapat tercapai tepat sasaran.
2. Memaksimalkan Aparatur Dinas yang ada, dengan cara melaksanakan tupoksi sesuai latar belakang penempatannya.



**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2022**

Usulan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka telah dituangkan dalam tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada bab III diatas. Dari tiap-tiap program/ kegiatan/ Sub kegiatan dan indikator program/ kegiatan/ Sub kegiatan beserta outputnya dengan kebutuhan anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Sehingga gambaran program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023**  
**KABUPATEN BANGKA**

**OPD : DINAS**  
**PERHUBUNGAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			20.285.012.500,00			20.144.012.500,00	- 141.000.000,00	

		Presentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	90,00%		Presentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	90,00%		-	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Prasarana Jalan	62,50%	18.913.012.500,00	Persentase Peningkatan Jumlah Prasarana Jalan	62,50%	18.913.012.500,00	-	
		Persentase Perlengkapan Jalan Penunjang Keselamatan Lalu Lintas	60,00%		Persentase Perlengkapan Jalan Penunjang Keselamatan Lalu Lintas	60,00%			
		Persentase Prasarana jalan yang terpelihara	72,50%		Persentase Prasarana jalan yang terpelihara	72,50%			
		Persentase perlengkapan jalan yang terpelihara	60,00%		Persentase perlengkapan jalan yang terpelihara	60,00%			
2.15.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	754 Unit ((PJU 750 unit: Desa Bukit Layang 83 unit, Desa Mangka 18 Unit, Desa Puding Besar 30 unit, Desa Kayu Besi 10 unit, Desa Nibung 14 unit, Kel. Romodong Indah 70 unit, Kel. Air Asam 50 unit, Kel. Kuto Panji 70 unit, Desa Merawang 20 unit, Kel. Parit Padang 50 unit, Kel. Surya Timur 63 unit,	12.283.737.500,00	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	754 Unit ((PJU 750 unit: Desa Bukit Layang 83 unit, Desa Mangka 18 Unit, Desa Puding Besar 30 unit, Desa Kayu Besi 10 unit, Desa Nibung 14 unit, Kel. Romodong Indah 70 unit, Kel. Air Asam 50 unit, Kel. Kuto Panji 70 unit, Desa Merawang 20 unit, Kel. Parit Padang 50 unit, Kel. Surya Timur 63 unit, Warning Light 4 unit)	12.283.737.500,00	-	

			Warning Light 4 unit)						
2.15.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 paket	1.170.000.000,00	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 paket	1.170.000.000,00	-	
2.15.02.2.02.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 paket	5.384.275.000,00	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 paket	5.384.275.000,00	-	
2.15.02.2.02.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 paket	75.000.000,00	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 paket	75.000.000,00	-	
		<b>Persentase Peningkatan Rute angkutan transportasi ke sentra ekonomi</b>	<b>7,50%</b>		<b>Persentase Peningkatan Rute angkutan transportasi ke sentra ekonomi</b>	<b>7,50%</b>			
2.15.02.2.03	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Jumlah Terminal yang tersedia</b>	<b>2 unit</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>Jumlah Terminal yang tersedia</b>	<b>2 unit</b>	<b>200.000.000,00</b>	-	
2.15.02.2.03.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	200.000.000,00	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	200.000.000,00	-	
2.15.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Jumlah Titik Parkir yang dikelola dengan baik</b>	<b>23 ruas</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>Jumlah Titik Parkir yang dikelola dengan baik</b>	<b>23 ruas</b>	-	- 200.000.000,00	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.000.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			- 200.000.000,00	tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat
		<b>Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Layak Jalan</b>	<b>100%</b>		<b>Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Layak Jalan</b>	<b>100%</b>			
2.15.02.2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji KIR</b>	<b>55%</b>	<b>747.000.000,00</b>	<b>Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji KIR</b>	<b>55%</b>	<b>747.000.000,00</b>	-	

2.15.02.2.05.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	747.000.000,00	Jumlah prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	1 Unit	747.000.000,00	-	
		<b>Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Umum dan Barang</b>	<b>5%</b>		<b>Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Umum dan Barang</b>	<b>5%</b>			
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	85%	100.000.000,00	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	85%	100.000.000,00	-	
2.15.02.2.06.05	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	100.000.000,00	-	
2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang disusun	1 dokumen	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Andalalin yang disusun	1 dokumen	25.000.000,00	-	
2.15.02.2.07.04	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 laporan	25.000.000,00	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 laporan	25.000.000,00	-	
		<b>Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Layak Jalan</b>	<b>100%</b>		<b>Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Layak Jalan</b>	<b>100%</b>			
2.15.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 kali	100.000.000,00	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 kali	159.000.000,00	- 59.000.000,00	
2.15.02.2.08.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 laporan	159.000.000,00	- 59.000.000,00	upaya dalam rangka peningkatan layanan inspeksi audit dan pemantauan kendaraan bermotor

02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.484.151.560,00			8.468.690.560,00	- 984.539.000,00	
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	26,00		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	26,00			
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11,00		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11,00			
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	111.724.800,00	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	130.729.800,00	19.005.000,00	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%			
2.15.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	23.850.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	23.850.000,00	-	
2.15.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	15.000.000,00	-	
2.15.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	-	
2.15.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	-	
2.15.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	-	

2.15.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	26.150.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	45.155.000,00	19.005.000,00	adanya pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan realisasi kinerja SKPD
2.15.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	16.724.800,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	16.724.800,00	-	
		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan dalam LHP BPK RI</b>	<b>0%</b>		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan dalam LHP BPK RI</b>	<b>0%</b>			
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	4.136.431.200,00	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	4.256.771.200,00	120.340.000,00	
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100%		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100%			
2.15.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	4.101.431.200,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	4.211.431.200,00	110.000.000,00	adanya penambahan jumlah ASN di Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	15.000.000,00	-	
2.15.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	10.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	20.340.000,00	10.340.000,00	pengoptimalan laporan akhir tahun
2.15.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeste SKPD	40 laporan	10.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeste SKPD	40 laporan	10.000.000,00	-	

		<b>Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>64</b>		<b>Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>64</b>			
2.15.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	45%	54.300.000,00	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	45%	266.800.000,00	212.500.000,00	
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%			
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%		Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%			
2.15.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.800.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	159.800.000,00	150.000.000,00	pengadaan pakaian lapangan dalam menunjang kegiatan di lapangan
2.15.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	7.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	7.000.000,00	-	
2.15.01.2.05.04	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	37.500.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00	62.500.000,00	untuk pemenuhan kebutuhan diklat tenaga fungsional balai KIR dan kebutuhan PPNS di Dinas Perhubungan
		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>			
2.15.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	230.392.290,00	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	280.392.290,00	50.000.000,00	
		Jumlah Aspek layanan Perangkat Daerah yang di kelola sesuai Peraturan	3%		Jumlah Aspek layanan Perangkat Daerah yang di kelola sesuai Peraturan	3%			

2.15.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	210.392.290,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	260.392.290,00	50.000.000,00	penambahan dalam upaya peningkatan koordinasi pembangunan sarana perhubungan
2.15.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	-	
		<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>			
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	70%	1.465.120.225,00	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	70%	1.711.335.225,00	246.215.000,00	
2.15.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 paket	1.281.400.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 paket	1.281.400.000,00	-	
2.15.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	49.935.225,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	49.935.225,00	-	
2.15.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	133.785.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	250.000.000,00	116.215.000,00	adanya penambahan pengadaan prasarana dalam menunjang kegiatan administrasi di terminal dan balai KIR
2.15.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	130.000.000,00	130.000.000,00	pemenuhan kebutuhan gudang
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.128.598.045,00	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.465.077.045,00	336.479.000,00	



2.15.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	931.971.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.268.450.000,00	336.479.000,00	adanya penambahan tenaga honorer
2.15.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.432.955,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.432.955,00	-	
2.15.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.194.090,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.194.090,00	-	
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	80%	357.585.000,00	Persentase BMD dalam kondisi baik	80%	357.585.000,00	-	
2.115.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	142.585.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	142.585.000,00	-	
2.115.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15.000.000,00	-	
2.115.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	-	
JUMLAH				27.769.164.060,00			28.612.703.060,00	843.539.000,00	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2023. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2023 serta mengacu pada perencanaan tahun kedua Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Juni Tahun 2023.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2023, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

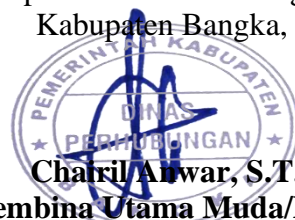
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Juni Tahun 2023. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Sangat disadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Perubahan Renja sangat diharapkan sehingga Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

Demikian Perubahan Rencana Dinas Perhubungan ini disusun, terima kasih.

Sungailiat, Juli 2023

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Bangka,



**Chalril Alwar, S.T.**  
**Pembina Utama Muda/IV c**  
**NIP. 19631004 1999031012**